

## **Perlu Aksi Nyata Global Selamatkan Lingkungan**

Kesadaran menjaga satu planet yang menunjang kehidupan penghuninya belum cukup tanpa aksi nyata global memasukkan konsep daya dukung lingkungan dalam pembangunan ekonomi. Kini waktu tepat menyiapkan kerangka kerja global pembangunan berkelanjutan, termasuk produksi dan konsumsi berkelanjutan.

"Tak ada waktu yang lebih baik daripada saat ini," kata Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon. Hal itu disampaikan di hadapan delegasi dari 163 negara anggota PBB (total anggota 193 negara), 113 menteri dan perwakilan para pemangku kepentingan pada penutupan Sidang Lingkungan PBB (UNEA) pertama, Jumat (27/6) malam, di Kantor PBB di Nairobi, Kenya, seperti dilaporkan wartawan Kompas, Gesit Ariyanto.

Tahun depan adalah batas akhir target Tujuan Pembangunan Milenium (MDG), yang perlu kerangka kerja baru untuk melanjutkan model pembangunan global menuju kehidupan bermartabat bagi semua. Sidang pertama UNEA di Nairobi menjadi awal terbentuknya agenda pembangunan setelah 2015.

Penerimaan di antara pemerintah dan komunitas global bahwa lingkungan sehat diperlukan untuk memberantas kemiskinan ekstrem, mendukung pertumbuhan ekonomi adil, dan kemajuan sosial sebagai langkah maju. "Tahap penting berikut, yakni pembangunan manusia, agenda universal pembangunan berkelanjutan pasca 2015," ujarnya.

Agenda baru itu butuh suara kuat bagi lingkungan diperkuat sejak KTT tentang Pembangunan Berkelanjutan PBB di Brasil pada 2012 atau Rio+20 yang menghasilkan dokumen "The Future We Want". Sejak saat itu, komunitas global didesak melihat realitas bahwa semua aspek pembangunan tak lepas dari persoalan daya dukung lingkungan sehingga harus diadopsi dalam setiap pengambilan keputusan.

"Pesan saat ini jelas, melindungi sistem penunjang kehidupan manusia adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan. Itu tugas kita semua," kata Ki-moon. Karena itu perlu mendorong perubahan relasi manusia dengan Bumi, yakni mengubah perilaku dan praktik sehari-hari di berbagai aspek.

Para pemimpin dunia, pengambil kebijakan dalam berbagai kelompok, sektor industri dan komunitas global perlu mengenali isu-isu, lalu membuat kebijakan yang mempercepat mengatasi isu besar. Di luar agenda pembangunan berkelanjutan adalah soal perubahan iklim.

Presiden Kenya Uhuru Kenyatta menegaskan, komitmen negaranya mengikuti apa yang jadi perhatian bersama Sidang UNEA. Ia berterima kasih atas sesi pembahasan tingkat menteri tentang perdagangan ilegal kehidupan liar yang jadi masalah di Kenya dan negara-negara di Afrika. "Kami siap mendukung dan jadi bagian dari pembangunan berkelanjutan," ujarnya.

Dua minggu ke depan, hasil Sidang UNEA akan dibawa pada pertemuan tingkat tinggi Forum Politik soal Pembangunan Berkelanjutan di New York, AS. Terkait itu, Senin ini, Indonesia diwakili Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuya diundang khusus ke New York.